REVIEW RANKHIR RENSTRA

TAHUN 2018 – 2023



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun Review Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

Demikian Review Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yang merupakan pedoman pelaksanaan program , kegiatan, sub kegiatan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

Nganjuk, 10 Maret 2022
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk



NAFHAN TOHAWI, S.H.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
KATA PENGANTAR ..... ……..ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR BAGAN vi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 15
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah 32

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah …….. 34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan
Wakil Kepala Daerah 36
3.3 Telaahan Review Renstra Kementerian/ Lembaga dan
Renstra 38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis 47

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 49

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi 53
5.2 Kebijakan 54

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan 58

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama 138

7.2 Indikator Kinerja Kunci 140

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi 140

8.2 Kaidah Pelaksanaan 140

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Dinas Sosial PPPA Per Tahun 2021.....21
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di
Perangkat Daerah Tahun 2021 21
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di
Dinas Sosial PPPA Per Tahun 2021.....22
Tabel 2.4 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
yang Telah Ditangani Tahun 2020 (di Luar ABH) 26
Tabel T.C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023
(Renstra Periode yang Lalu) 29
Tabel T.C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 30
Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam
Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah 37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2023 51
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 56
T.C. 27 Rencana Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 58
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial PPPA 139
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial PPPA 140

DAFTAR BAGAN

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , maka semua dokumen perencanaan harus di sesuaikan atau di Review baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, selain itu dipengaruhi juga oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya refocusing anggaran sehingga perlu juga mereview renstra Dinas Sosial PPPA Tahun 2018 – 2023.

Review Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan Review dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Keterkaitan Review Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah. Penyusunan Review Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan memperhatikan Review Renstra Kementerian/ Lembaga, Review Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten /Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020.

Review Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Review Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Review Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam

pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Review Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor4301);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
17. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
23. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
24. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
25. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
26. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
28. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

29. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
31. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
32. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
33. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak;
34. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
35. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
36. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
37. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
45. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
46. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Bab XVI tentang Penanggulangan Kemiskinan;
47. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
48. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
56. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
57. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
58. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentangPengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
60. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyususnan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
63. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
65. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada Standar Pelayanan minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
67. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
68. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
69. Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
70. Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05 Seri E);
71. Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
72. Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (lembaran daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 336 Seri E);
73. Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023;
74. Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan RPJMD;
75. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu dua tahun (sampai masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir) yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta Sub Kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Review Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan gambaran perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan perangkat daerah sampai masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan sampai masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir.

1.4 Sistematika Penulisan

Review Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas penyebab terjadinya Review Renstra Perangkat Daerah, fungsi Review Renstra Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Review Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Review Renstra Perangkat Daerah dengan Review RPJMD, Review Renstra K/L dan Reviw Renstra Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Review Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Review Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Review Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Review Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau Indikator lainnya seperti SDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tabel T-C.24 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Review Renstra K/L dan Review Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang linier, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi visi dan misi Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Review Renstra Kementerian/Lembaga dan Review Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Review Renstra K/L ataupun Review Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT-RW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini di-review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Review Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Review Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
4. Implikasi RT-RW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam dua tahun mendatang disajikan dalam Tabel T-C.26

BAB VI PROGRAM , RENCANA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah disajikan dalam Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7.1 Indikator Kinerja Utama

7.2 Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Review Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2021 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, menyelenggarakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Kasubag :

- Kasubag Perencanaan
- Kasubag Keuangan
- Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Sekretariat, mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. Pembinaan aparatur;
e. Pengelolaan urusan kepegawaian;
f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
h. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
i. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanan, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;
c. Menyiapkan penyusunan pelaporan kinerja;
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan;
b. Melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
c. Melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
d. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
e. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
f. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan urusan persuratan;
b. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan membawahi 3 (tiga) Kasi :

- Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Kasi Rehabilitasi Sosial
- Kasi Kebencanaan

Bidang Perlindungan, Jaminan Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan mempunyai **tugas** melaksanakan kebijakan teknis menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan rehabilitasi sosial serta jaminan sosial.

Mempunyai Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan / atau lembaga;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial keluarga;
d. Pengembangan data pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS (ODHA)dan penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan membawahi 3 (tiga) Kasi :
   - Kasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Dana Sosial
   - Kasi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan Kelembagaan Sosial
   - Kasi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

   Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai **tugas** merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Mempunyai Fungsi :
   a. Pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
   b. Perumusan pedoman penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
   c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
   d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
   e. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 3 (tiga) Kasi :
   - Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   - Kasi Peningkatan Kualitas Keluarga
   - Kasi Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak

   Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai **tugas** merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikandan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak.

   Mempunyai Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
   b. Perumusan pedoman teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;

c. Pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

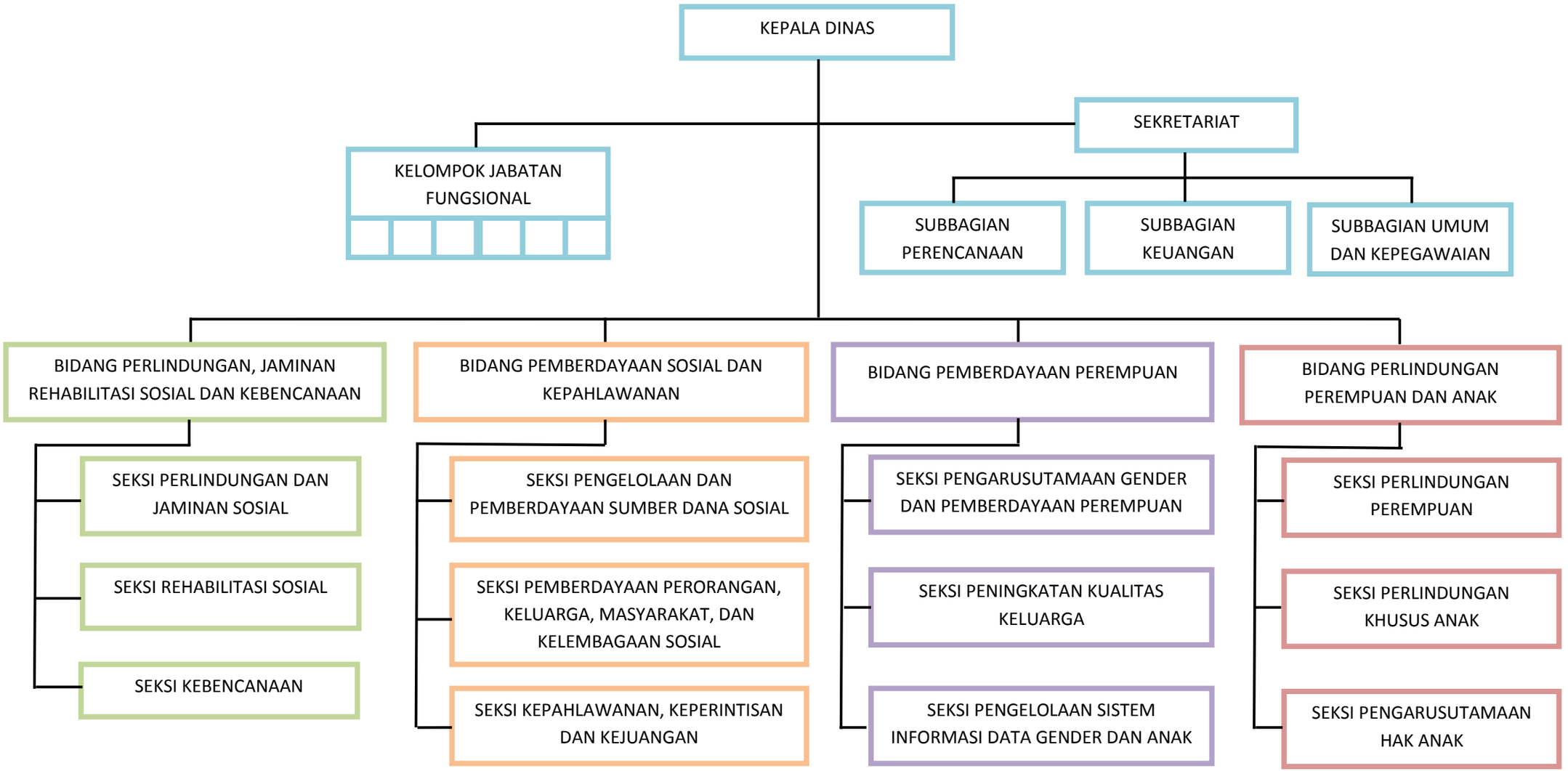
g. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi 3 (tiga) Kasi :
- Kasi Perlindungan Perempuan
- Kasi Perlindungan Khusus Anak
- Kasi Pengarusutamaan Hak Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai **tugas** merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak.

Mempunyai Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
c. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan percepatan kabupaten layak anak (kla) dan pengarusutamaan hak anak (pha) sesuai amanat konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN NGANJUK



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di Dinas Sosial PPPA Per Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	SD Sederajat	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	2	1	32	9
4	D3	-	-	1	1
5	S1	8	9	20	10
6	S2	2	3	1	-
Jumlah		**12**	**13**	**54**	**20**

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	2	-	2
3	Golongan III	7	10	17
4	Golongan IV	3	3	6

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial,PPPA Per Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor	4		4
2	Mobil	10		10
3	Sepeda Motor	62		62
4	AC	20		20
5	Kipas Angin	7		7
6	Komputer	12		12
7	Laptop	12		12

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan terdapat di 4 (empat) lokasi ditempati untuk bangunan Kantor Dinas, WCC untuk penanganan Kasus KTPA, Rumah Singgah untuk penanganan kasus PMKS, dan TMP (Taman Makam Pahlawan) Yudha Pralaya.
2. Mobil Operasional berjumlah 10 Unit jenis, yaitu Innova 1 unit, Avanza 1 Unit, Panther 1 Unit, Carry 4 Unit, Luxio 1 Unit, APV (Ksatria Sosial) 1 Unit Rescue (Tagana) 1 Unit.

3. Sepeda motor operasional berjumlah 62 unit jenis, yaitu Beat 2 unit, Vario 2 unit, Frego 9 unit, Smash 2 Unit, GL 1 Unit, KLX 3 Unit untuk Tagana, Revo 21 Unit untuk PKH, KLX 1 Unit untuk PKH, Jupiter 19 Unit untuk TKSK, KLX 1 Unit untuk TKSK.
4. AC berjumlah 20 unit, yaitu Sekretariat 6 Unit, Bidang PJRS 2 Unit, Bidang PSKM 2 Unit, Bidang PPPAM 2 Unit, Bidang PPA 2 Unit, Ruang Rapat 3 Unit, Ruang Peksos 1 Unit, dan Ruang PKH 2 Unit.
5. Kipas Angin berjumlah 7 Unit, yaitu Sekretariat 4 Unit, PSKM 1 Unit, PPA 1 Unit, dan Ruang Peksos 1 Unit
6. Komputer untuk administrasi perkantoran sebanyak 12 Unit, yaitu Sekretariat 3 Unit, Bidang PJRS 2 Unit, Bidang PSKM 1 Unit, Bidang PPPAM 2 Unit, Bidang PPA 3 Unit, dan Ruang Peksos 1 Unit.
7. Laptop untuk keperluan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sebanyak 12 Unit, yaitu Sekretariat 7 Unit, Bidang PJRS 2 Unit, Bidang PSKM 1 Unit, Bidang PPPAM 1 Unit, dan Bidang PPA 1 Unit.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Sosial

Kondisi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sebagian besar sebagai buruh tani masih banyak yang tergolong masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pengertian kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan karena kelangkaan perangkat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun

sulitnya akses pada pendidikan dan kesehatan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Nganjuk tahun 2018 sebesar 12,11 % dan menurun di tahun 2019 menjadi 11,24 % sedangkan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 11,62 % sebagai dampak pandemi covid 19. Pandemi covid 19 berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat serta dunia usaha. Sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dan pemutusan hubungan kerja. Angka kemiskinan ini merupakan data makro hasil survei Sosial Ekonomi Nasional. Angka kemiskinan sering dipertentangkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan data mikro sehingga by name dan by addresnya ada. Data terpadu kesejahteraan sosial merupakan data sasaran bagi calon penerima program program bantuan sosial yang pendataannya berdasar 40% penduduk yang pengeluarannya terendah secara nasional. Program yang secara nasional digunakan untuk intervensi DTKS diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) , Jaminan Kesehatan , Jaminan Pendidikan dan sebagainya.

Pada lima tahun terakhir rata rata angka kemiskinan di kabupaten Nganjuk masih relatif lebih tinggi dibanding dengan angka provinsi dan angka nasional. Meskipun secara umum presentasi kemiskinan di kabupaten Nganjuk menurun, tetapi penurunannya masih landai atau kurang tajam. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih keras lagi dan dengan cara yang tetap untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pencapaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial dapat diukur dengan 2 indikator. *Pertama*, Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2020 sebesar 110,99% dari target 90%. *Kedua*, Persentase Jumlah PMKS/ PPKS dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2020 sebesar 85,33% dari target sebesar 4,77%.

Sedangkan sasaran Meningkatnya Jumah PSKS yang Aktif diukur dengan indikator Persentase jumlah PSKS yang aktif dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2020 sebesar 157,22% dari target sebesar 50%.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki – laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0 – 100 persen, apabila nilai IPG semakin tinggi maka kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. IPG digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki-laki dan IPM perempuan sama seimbang.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang signifikan tingkat kesejahteraan lakilaki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk adalah perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan jauh lebih kecil dari laki-laki

serta partisipasi perempuan dalam lembaga parlemen/DPRD serta jabatan-jabatan lain dalam pengambilan keputusan masih kurang.

Pencapaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dapat diukur dengan 3 indikator. *Pertama*, Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Meningkat dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2020 sebesar 109,26% dari target sebesar 30%. *Kedua*, Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak Yang Difasilitasi Penyelesaiannya dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2020 sebesar 100% dari target sebesar 100%. *Ketiga*, Meningkatnya Persentase Kecamatan Layak Anak dengan kondisi capaian di akhir Tahun 2020 sebesar 5% dari target sebesar 25%.

Kasus kekerasan yang terjadi merupakan fenomena gunung es, yang berarti masih banyak kasus lain yang belum terungkap dan belum melapor. Tahun 2017-2020 jumlah kasus kekerasan meningkat. Diduga penyebabnya antara lain adalah:

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara;
2. Masyarakat menanamkan nilai bahwa laki-laki harus kuat, berani dan tanpa ampun;
3. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terkait relasi suami istri:
4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

Berikut ini data Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan dan telah selesai ditangani sesuai dengan jenis layanan yang diperlukan pada tahun 2020.

Tabel 2.4

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Yang Telah Ditangani Tahun 2020 (di luar ABH)

No	Kecamatan	Jenis kasus							
		Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran	
		P	A	P	A	P	A	P	A
1	Sawahan		1				1		
2	Ngetos				1				
3	Berbek		2	1	1		4	1	
4	Loceret	1	2	4			1		
5	Pace				1		1	1	
6	Prambon	1						1	
7	Ngronggot	1			1		2		
8	Kertosono	1	1	2	2		3		
9	Patianrowo				1		1		
10	Baron		2	3	2		1		
11	Tanjunganom			2	1		1		
12	Sukomoro	1	13	3			2		
13	Nganjuk	1	3	2	5		1		
14	Bagor	1	2	4	4		1		
15	Wilangan		4	1			1		
16	Rejoso		3	1	1		1		
17	Gondang		3				2		
18	Ngluyu	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Lengkong	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Jatikalen						1		
JUMLAH 113		**7**	**36**	**23**	**20**	**0**	**24**	**3**	**0**

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang sangat penting karena anak adalah generasi yang akan datang sehingga wajib dilindungi dari segala hal yang dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangannya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Disisi lain dalam SDGs khususnya pada *Goal* 11 mengenai kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan dan *Goal* 16 mengenai masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non–diskriminasi, secara eksplisit bertujuan ingin menciptakan kota dan hunian yang inklusif dan aman termasuk bagi anak selain itu menghendaki adanya masyarakat yang hidup tanpa kekerasan terlebih-lebih pada anak. Hal ini menunjukan bahwa perlindungan anak menjadi perhatian besar bagi dunia internasional.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 terlihat pada Tabel T-C.23 berikut ini :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsos PPPA

Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial PPPA Tahun ke- (2019-2023)					Realisasi Capaian Tahun ke- (2019-2023)					Rasio Capaian Pada Tahun ke- (2019-2023)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Jumlah PMKS yang Tertangani	100%	88%		88%	90%	92%	94%	95%	93,09%	93,09%	-	-	-	95%	97%	-	-	-
2	Persentase Jumlah PMKS	100%	5,17%		5,17%	4,77%	4,37%	3,97%	3,57%	5,97%	5,97%	-	-	-	87%	80%	-	-	-
3	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	100%	45%		45%	50%	55%	60%	65%	73,75%	73,75%	-	-	-	61%	68%	-	-	-
4	Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Meningkat	100%	25%		25%	30%	35%	40%	45%	33,68%	33,68%	-	-	-	74%	89%	-	-	-
5	Persentase Kasus Tindak Kekerasan dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
6	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%	15%		15%	25%	50%	75%	100%	25%	25%	-	-	-	60%	100 %	-	-	-

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinsos PPPA

Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantor	643.433.000	558.895.700	586.601.000	620.187.000	657.084.000	586.139.142	487.671.828	-	-	-	91,10 %	87,3 %	-	-	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	820.484.600	1.031.244.000	1.077.375.000	1.149.941.000	1.118.355.000	781.437.562	1.059.494.508	-	-	-	95,24 %	102, 7%	-	-	-		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.800.000	5.000.000	10.650.000	11.260.000	11.930.000	8.200.000	4.800.000	-	-	-	93,18 %	96,0 %	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Refocusing	110.941.000	117.293.000	124.271.000	-	Refocusing	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	23.658.000	16.641.000	17.593.000	18.640.000	14.557.000	22.652.000	-	-	-	97,05 %	95,7 5%	-	-	-		

Program Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	2.093.098.000	1.109.508.900	4.193.000.000	4.362.000.000	4.659.000.000	1.705.578.550	1.062.196.235	-	-	-	81,49%	95,74%	-	-	-		
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma/ Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	-	Refocusing	46.595.000	49.263.000	52.193.000	-	Refocusing	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	826.160.000	542.850.500	1.643.469.000	1.713.637.000	1.806.441.000	770.916.300	482.549.500	-	-	-	93,31%	88,89%	-	-	-		
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	620.000.000	495.992.500	933.014.000	986.434.000	1.045.121.000	500.270.100	418.505.025	-	-	-	80,69%	84,38%	-	-	-		
Program Kesetaraan Gender dan Peran Aktif Masyarakat	722.604.000	327.241.800	1.303.558.000	1.378.193.000	1.460.187.000	638.269.550	258.438.275	-	-	-	88,33%	78,97%	-	-	-		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial PPPA pada dua tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Masih tingginya angka kemiskinan di daerah tertentu yang belum bisa dijangkau oleh pelayanan sosial.
b. Masih kurangnya tenaga dan alat/kendaraan operasional untuk mengatasi PMKS/PPKS.
c. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
d. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
g. Sinergitas antar pengampu kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kurang
h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
i. Anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kurang.

j. Masih kurangnya pemahaman bagi pemangku kepentingan dan lembaga masyarakat tentang konvensi Hak Anak.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada dua tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Adanya komitmen antar lembaga dan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.
b. Adanya usaha peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang menangani masalah sosial, baik melalui pelatihan maupun rekruitmen.
c. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
d. Adanya dukungan kebijakan dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
e. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
f. Adanya dukungan kebijakan dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan Gender.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesejahteraan sosial:

   1) Belum optimalnya kualitas pelayanan sosial dikarenakan belum adanya database PPKS/PMKS yang Valid, Sarpras yang terbatas dan anggaran yang sangat minim.
   2) Masih kurangnya SDM unsur sosial.
   3) Masih rendahnya usaha pemberdayaan masyarakat miskin

   Isu Strategis :

   1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan semakin meningkat
   2. Kebutuhan terhadap data kemiskinan yang terpadu, valid dan update semakin meningkat
   3. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan semakin meningkat
   4. Pengelolaan data kemiskinan semakin terintegrasi guna mendukung kebijakan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan

b. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

   1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurun namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Tren IPG dari tahun 2017-2020 mengalami penurunan (93,48 – 93,26 – 93,27 – 93,26) dan lebih tinggi dari IPG Provinsis Jawa Timur (90,76 – 90,77 – 90,91 – 91,07).

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah yaitu sebesar 69,90 pada tahun 2020 dan masih dibawah rata-rata Jawa Timur (71,29) dan di tahun 2017-2020 IDG Kabupaten Nganjuk: 66,56 – 65,00 – 68,45 – 69,90 sedangkan IDG Provinsi Jawa Timur di tahun 2017 – 2020 : 69,37 – 69,71 – 73,04 – 73,03.
3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari perbandingan Keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam parlemen sebesar 12 : 51 (23,5%) lebih rendah dari periode sebelumnya yaitu 10 : 35 (28,6%).
4) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, jumlah kasus KDRT tahun 2020 sebanyak 113 kasus.
5) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
6) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
7) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
8) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
9) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
10) Masih belum maksimalnya kantor/lembaga dalam pemenuhan hak anak.

11) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
12) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

Isu Strategis :

1. Pemahaman masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak semakin meningkat.
2. Kesempatan perempuan dalam partisipasi di pemerintahan, politik, dan pembangunan semakin meningkat.
3. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam PUG semakin meningkat
4. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak semakin meningkat
5. Partisipasi masyarakat dalam penanganan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin meningkat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah **"Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)"** Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berkomitmen untuk maju dengan membangun desa dan menata kota yang berarti untuk mewujudkan masyarakat Nganjuk yang maju merata antara desa dan kota harus dibarengi dengan penumbuhan kreatifitas masyarakat, dalam pengertian ada keseimbangan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD yang sesuai dengan pelayanan Dinas Sosial PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas

   Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM yang unggul.

   Sasaran :

   1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
   2. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: 1.Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas	Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat miskin Penanganan kasus PMKS/PPKS belum maksimal Masih banyaknya data orang miskin dan tidak memiliki rumah layak huni IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap	• Belum ada data akurat dan berkelanjutan tentang angka kemiskinan • Kurangnya sarana dan fasilitas untuk penanganan PMKS/PPKS terlantar • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum	• Adanya komitmen pemerintah untuk mengentaskan dan mengurangi angka kemiskinan melalu program-program pemerintah pro rakyat miskin • Adanya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pro
2	Tujuan: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM yang unggul			
3	Sasaran: 1. Meningkatnya kesejahteraan			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	masyarakat 2. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	perempuan dan jumlah kasus KDRT. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kemiskinan • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan dan nilai modal sosial Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A/PPA • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kementerian Sosial1

Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1 Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024, hal : 39 - 40

Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut:

Tabel 1. Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
T1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
T2	Meningkatkan Layanan yang Berkualitas oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional	1. Indeks Partisipasi Sosial 2. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 5. Persentase (%) K/L/D yang memanfaat kan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program pe nanggulangan kemiskinan
T3	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Target Sasaran pada Tujuan Strategis 1 mencangkup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% (empat puluh persen) penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai dua definisi yaitu rentan miskin (hampir miskin) dan/ atau ketidakmampuan (vulnerable) seperti PPKS/PMKS. Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. Pasal 5 disebutkan Penduduk rentan memilki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya negara. Penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk rentan kesejahteraan sosial, yaitu para PPKS.

2. Tujuan Strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional

Peningkatan layanan publik bidang sosial dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi warga negara dalam mengakses dan mendapatkan layanan terbaik dalam bidang sosial. Kementerian Sosial berkomitmen dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Terdapat 2 (dua) sasaran yang menjadi fokus Kementerian Sosial yaitu meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas data terpadu.

3. Tujuan Strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Sosial yang

menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), WBK, dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan

k. Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2024). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk

   Miskin dan Rentan, ditandai dengan tercapainya

   sasaran strategis sebagai berikut

   Tabel 2. Rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial

SS1 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T1 yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainya SS1. Pencapaian SS1 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1.

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis pada tabel 3

SS2 merupakan sasaran yang berorientasi pada peningkatan layanan melalui peningkatan kualitas pemberi layanan dan kualitas data. SS2 merupakan sasaran yang memfokuskan pada partisipasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemanfaatan data kesejahteraan sosial dalam program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 3. Rincian Sasaran Strategis 2 dan 3 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan social	Indeks Partisipasi Sosial
		Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
		Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahter aan Sosial yang terakreditasi
		Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
SS#	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyeleng garaan program penanggulangan Kemiskinan

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikuti :

Pelaksanaan SS4 merupakan sasaran terkait kualitas tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan efektivitas tata kelola (akuntabilitas kinerja, opini laporan keuangan, manajemen risiko, zona integritas, maturitas unit kerja pengadaaan barang atau jasa, dll), kualitas pelayanan publik (implementasi *open government* di Kementerian Sosial dan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial), dan kualitas manajemen ASN.

Tabel 4. Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan public	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2020-2024, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial. . Berdasarkan hal tersebut diatas tantangan utama pembangunan kesejahteraan sosial pada dua tahun ke depan yaitu:

1. taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan yang masih rendah.
2. kualitas layanan yang belum berkualitas oleh pelaku penyelenggara

   Kesejahteraan sosial.

3. tata kelola serta birokrasi yang belum efektif

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyusunan tujuan Kementerian PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan stabilitas

Penyusunan tujuan Renstra Kementerian PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.

Tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian PPPA adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
c. TPAK Perempuan; dan
d. Indeks PUG Nasional.

2. **Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
b. Indeks Kualitas Keluarga.

4. **Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban

kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

a. Indeks Reformasi Birokrasi;
b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
c. Tingkat Maturitas SPIP; dan Nilai SAKIP.

a. Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan pelayanan Dinas Sosial PPPA dengan telaahan RTRW dan KLHS (indikator SDG's) dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini :

a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

Dalam mendukung pencapaian indikator di atas, Dinsos PPPA mempunya beberapa progran diantaranya :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Program Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial)
2. Program pembinaan anak terlantar dan anjal
3. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (Program pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat)

    a. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas

    Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah : Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

    b. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan

    Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut diantaranya :

    1. Program penguatan kelembagaan PUG
    2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

a. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

Beberapa program yang mendukung pencapaian indikator tersebut diantaranya :

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
2. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Dalam RTRW tidak diatur mengenai rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang. Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah juga tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

   Indikator 1 : Tingkat kemiskinan

   Indikator 2 : Persentase penurunan PMKS/PPKS

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini meliputi sebagai berikut :

   a. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial

      Indikator : - Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani

      - Persentase jumlah PMKS/PPKS menurun

   b. Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif

      Indikator : Persentase jumlah PSKS yang aktif

2. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

   Indikator 1 : Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   Indikator 2 : Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah :

   a. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

   b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

      Indikator :

      1. Meningkatnya persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural.

2. Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya.
3. Persentase Kecamatan yang Layak Anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020–2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Data Capaian 2020	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2020	Target tahun (%)		
								2021	2022	2023
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a.Tingkat kemiskinan	11,62	11,75	a. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	a. Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	99,87%	92	94	95
		b.Persentase penurunan PMKS/ PPKS	0,30	0,40		b. Persentase PMKS/PPKS menurun	0,30%	0,40	0,40	0,40
		Sebelum perubahan								
		Sesudah perubahan	**Menjadi indikator Dinsos P3A**			**Sesudah perubahan**	7,94%	4,47	4,17	3,87
					b. Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	c. Persentase jumlah PSKS yang aktif	78,61%	55	60	65
2	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a.Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,26	93,56	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	a. Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	32,78%	35	40	45
						b. Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	100	100	100
		b.Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,50%	72%	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak					
						c. Persentase Kecamatan Layak Anak	5% Sblm perubahan	50	75	100

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Data Capaian 2020	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2020	Target tahun (%)		
								2021	2022	2023
							5% Sesudah perubahan	5	10	15

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat.
2. Mereview, menyusun dan mengkoordinasikan permasalahan yang membuat penanganan PMKS masih sulit dijangkau.
3. Meningkatkan kualitas SDM unsur sosial agar lebih cepat tanggap dalam menanganani permasalahan sosial.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas PSKS.
6. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
7. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
8. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
9. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
10. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.

11. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
12. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.
13. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak perempuan dan anak.
15. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
16. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di tingkat kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
17. Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap.
3. Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat.

5. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
6. Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.
7. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
8. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
9. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
10. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak
11. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial, PPPA Kab. Nganjuk

Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial b. Meningkatnyajumlah PSKS aktif	• Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat serta optimalisasi program pemberdayaan masyarakat • Mereview, menyusun dan mengkoordinasikan permasalahan yang membuat penanganan PMKS masih sulit dijangkau • Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Meningkatkan kapasitas PSKS • Meningkatkan kualitas SDM unsur sosial agar lebih cepat tanggap dalam menangani permasalahan sosial	- Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahtera an sosial. - Pembentukan tim koordinasi dalam penanganan masalah sosial yang cepat tanggap - Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Pendataan angka kemiskinan agar diperoleh data yang akurat
2	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Meningkatnya Kesetaraan & Keadilan Gender b. Meningkatnya pemberdaya an perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	• Menyusun,mereview,mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. • Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG • Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. • Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak • Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. • Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. • Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada	- Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG. -Peningkatan pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak -Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan. -Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang - Penguatan lembaga penyedia

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan sehingga bisa menjadi tenaga profesional dan memberikan kontribusi pendapatan dalam perekonomian	layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot. - Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak anak - Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
			• Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak perempuan dan anak • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di tingkat Kecamatan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak • Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah disajikan dalam Tabel T.C.27

Tujuan	Sasaran	Kode					Program , Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan Sosial	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100%	4.037.893.150	100%	4.597.170.000	100%	9.146.866.419	100%	17.781.929.569	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	
	Meningkatnya Jumlah PSKS yang aktif	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100%	10.593.000	100%	18.873.000	100%	69.203.950	100%	98.669.950	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	

Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun (Renstra, Renja, Perubahan Renstra, dan Perubahan Renja)		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama

								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru

		X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	10.593.000	100%	11.655.000	100%	13.403.250	100%	35.651.250	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan			Baru
		X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKPJ, dan LKjIP)		0%	0,00	100%	7.218.000	100%	8.300.700	100%	15.518.700	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan			Baru
		X	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**		**100%**	**3.277.997.000**	**100%**	**3.672.288.000**	**100%**	**4.260.468.800**	**100%**	**11.210.753.800**	**Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	

		X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN		100%	3.261.694.000	100%	3.486.885.000	100%	4.009.917.750	100%	10.758.496.750	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan		Orang/ Bulan		Orang/ Bulan		Orang/ Bulan				Baru
		X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan		100%	10.415.000	100%	178.043.000	100%	204.749.450	100%	393.207.450	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Hasil Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (SPP dan SPM)		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru

		X	XX	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang Disusun (Belanja Fungsional dan Belanja Administrasi)		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun		100%	2.944.000	100%	3.680.000	100%	3.900.800	100%	10.524.800	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen		Dokumen		Laporan		Laporan				Baru
		X	XX	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Laporan tanggapan pemeriksaan yang disusun		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama

								Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Laporan hasil Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang disusun (Laporan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran)		100%	2.944.000	100%	3.680.000	100%	3.900.800	100%	10.524.800	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen Laporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran yang Disusun		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama

								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	**XX**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**		**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**100%**	**66.500.000,00**	**100%**	**66.500.000,00**	**Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	
		X	XX	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Dapat Diamankan		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang disusun		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama

								Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		X	XX	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		X	XX	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun (Laporan Semesteran, Laporan Persediaan Barang dan Berita Acara)		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama

								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		X	XX	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun (Buku Inventaris, Kartu Inventaris Ruangan dan Usulan Status Penggunaan Barang Milik Daerah		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		X	XX	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru

		X	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**		**85%**	**8.000.000**	**100%**	**8.800.000**	**100%**	**157.500.000**	**100%**	**174.300.000**	**Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	
		X	XX	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang Ditingkatkan		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan		0%	0,00	0%	0,00	100%	40.000.000	100%	40.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		Paket		Paket		Paket				Baru
		X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru

		X	XX	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang Disusun		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan		0%	0,00	0%	0,00	100%	30.000.000	100%	30.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai,serta senam pagi		85%	8.000.000	100%	8.800.000	100%	40.000.000	100%	56.800.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama

								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun**		**85%**	**280.647.600**	**100%**	**193.170.350**	**100%**	**323.107.385**	**100%**	**796.925.335**	**Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	
		X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		85%	9.753.400	100%	9.750.700	100%	10.725.770	100%	30.229.870	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama

								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Paket		Paket		Paket		Paket				Baru
		X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0%	0,00	0%	0,00	100%	25.000.000	100%	25.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		Paket		Paket				Baru
		X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		0%	0,00	0%	0,00	100%	25.000.000	100%	25.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		Paket		Paket				Baru
		X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia		85%	91.943.150	100%	94.714.100	100%	104.185.510	100%	290.842.760	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		Paket		Paket				Baru
		X	XX	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		85%	11.801.550	100%	39.334.550	100%	43.268.005	100%	94.404.105	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama

								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		Paket		Paket				Baru
		X	XX	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		85%	1.800.000	100%	1.800.000	100%	3.600.000	100%	7.200.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia		0%	0,00	0%	0,00	100%	40.000.000	100%	40.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket		Paket		Paket		Paket				Baru
		X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		85%	10.440.500	100%	28.722.250	100%	31.594.475	100%	70.757.225	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan		85%	154.909.000	100%	18.848.750	100%	20.733.625	100%	194.491.375	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama

								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		X	XX	01	2.06	10	Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang dikelola	Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang dikelola		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	XX	01	2.06	11	Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang disusun	Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang disusun		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		X	**XX**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan**		**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**100%**	**2.075.000.000,00**	**100%**	**2.075.000.000,00**	**Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	

		X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan		0%	0,00	0%	0,00	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan		0%	0,00	0%	0,00	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan		0%	0,00	0%	0,00	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		0%	0,00	0%	0,00	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru

		X	XX	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan		0%	0,00	0%	0,00	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		0%	0,00	0%	0,00	100%	900.000.000	100%	900.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		0%	0,00	0%	0,00	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana GedunPendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		0%	0,00	0%	0,00	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**		**85%**	**194.900.000**	**100%**	**221.000.000**	**100%**	**298.900.000**	**100%**	**714.800.000**	**Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	
		X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia		85%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	8.000.000	100%	12.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia		85%	117.900.000	100%	144.000.000	100%	158.400.000	100%	420.300.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		0%	0,00	0%	0,00	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia		85%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	232.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		X	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat**		**85%**	**265.755.550**	**100%**	**483.038.650**	**100%**	**1.896.186.284**	**100%**	**2.644.980.484**	**Dinas Sosial PPPA**	**Dinas Sosial PPPA**	
		X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dirawat		0%	0,00	0%	0,00	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru

		X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemelihaaraan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dirawat		85%	125.539.200	100%	250.298.100	100%	275.327.910	100%	651.165.210	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dirawat		0%	0,00	0%	0,00	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dirawat		85%	33.800.200	100%	33.790.000	100%	42.512.769	100%	110.102.969	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dirawat		0%	0,00	0%	0,00	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru

		X	XX	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dirawat		0%	0,00	0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.500.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dirawat/direhabilitasi		85%	106.416.150	100%	198.950.550	100%	218.845.605	100%	524.212.305	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi		0%	0,00	0%	0,00	100%	450.000.000	100%	450.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi		0%	0,00	0%	0,00	100%	450.000.000	100%	450.000.000	Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA	Lama

								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		Unit		Unit				Baru
		1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial**		**87%**	**4.112.470.700**	**85%**	**9.992.887.950**	**87%**	**10.492.532.348**	**87%**	**24.597.890.998**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial**		**87%**	**3.267.792.850**	**85%**	**8.845.500.600**	**87%**	**9.165.021.055**	**87%**	**21.278.314.505**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya persediaan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial		0%	0,00	0%	0,00	87%	150.000.000	87%	150.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Terlaksananya persediaan sandang		0%	0,00	0%	0,00	87%	15.000.000	87%	15.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.01	03	Penyediaan alat bantu	Tersedianya alat bantu berupa alat dengar, kursi roda, dan tongkat kruk bagi penyandang disabilitas terlantar		0%	0,00	0%	0,00	87%	22.500.000	87%	22.500.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru

		1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya pelayanan Reunifikasi Keluarga		0%	0,00	0%	0,00	87%	12.500.000	87%	12.500.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		Orang		Orang		Orang		Orang			Baru
		1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya penanganan permasalahan anak dan PPKS lainnya di wilayah Kabupaten Nganjuk		0%	0,00	85%	62.056.800	87%	68.262.480	87%	130.319.280	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota		Orang		Orang		Orang		Orang			Baru
		1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya pemberian bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat di		87%	56.656.800	85%	766.000.000	87%	766.000.000	87%	1.588.656.800	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Kabupaten Nganjuk													
								Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang					Baru
		1	06	04	2.01	07	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indentitas Anak	Terlaksananya fasilitasi pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA bagi PPKS		0%	0,00	0%	0,00	87%	10.000.000	87%	10.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang					Baru

		1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya pemberian layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar		0%	0,00	0%	0,00	87%	10.000.000	87%	10.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya pemberian bantuan sosial untuk lansia miskin		87%	3.211.136.050	85%	7.384.296.050	87%	7.384.296.050	87%	17.979.728.150	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Terlaksananya verifikasi/pendataan, distribusi, monev, dan laporan penyaluran bansos lansia miskin												
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.01	10	Pemberian layanan Kedaruratan	Tersedianya pemberian bantuan bagi orang terlantar		0%	0,00	85%	633.147.750	87%	696.462.525	87%	1.329.610.275	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Terlaksananya hibah PMI												

								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya pelayanan penelurusan ke keluarga asal		0%	0,00	0%	0,00	87%	15.000.000	87%	15.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Fasilitasi lansia terlantar ke UPT PSTW		0%	0,00	0%	0,00	87%	15.000.000	87%	15.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani**		**87%**	**844.677.850**	**85%**	**1.147.387.350**	**87%**	**1.327.511.293**	**87%**	**3.319.576.493**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	

		1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya layanan data dan pengaduan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		0%	0,00	0%	0,00	87%	10.000.000	87%	10.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang					Baru
		1	06	04	2.02	02	Pemberian layanan Kedaruratan	Terlaksananya layanan kedaruratan		87%	489.367.750	0%	0,00	87%	15.000.000	87%	504.367.750	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang					Baru
		1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya persediaan permakanan		0%	0,00	85%	149.732.400	87%	164.705.640	87%	314.438.040	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang					Baru

		1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Terlaksananya persediaan sandang		0%	0,00	0%	0,00	87%	20.000.000	87%	20.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.02	05	penyediaan alat bantu	Terlaksananya penyediaan alat bantu		0%	0,00	0%	0,00	87%	24.011.208	87%	24.011.208	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.02	06	penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Terlaksananya Perbekalan kesehatan di luar panti		0%	0,00	0%	0,00	87%	10.000.000	87%	10.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru

		1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tersedianya pelayanan Sosial dan penampungan sementara bagi PPKS		87%	200.320.000	85%	201.394.950	87%	221.534.445	87%	623.249.395	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Terlaksananya penangann eks psikotik dan penderita gangguan jiwa berbasis keluarga												
								Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota		Orang		Orang		Orang		Orang			Baru
		1	06	04	2.02	08	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Temu Penguatan Penerima Manfaat dan Keluarga		87%	154.990.100	0%	0,00	87%	15.000.000	87%	169.990.100	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.02	09	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indentitas Anak	Terlaksananya fasilitasi pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA bagi keluarga penyandang PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA		0%	0,00	0%	0,00	87%	10.000.000	87%	10.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.02	10	Pemberiaan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	Terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak putus sekolah dan kesehatan dasar		0%	0,00	0%	0,00	87%	10.000.000	87%	10.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya layanan Penelusuran Keluarga		0%	0,00	0%	0,00	87%	15.000.000	87%	15.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.02	12	pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Pemberian bekal bagi orang terlantar dari luar daerah		0%	0,00	85%	10.000.000	87%	11.000.000	87%	21.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Mengantarkan klien kiriman dari luar daerah ke alamat keluarga klien		0%	0,00	0%	0,00	87%	15.000.000	87%	15.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	04	2.02	14	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kab/Kota	Kerjasama dengan lembaga rehabilitasi dalam penanganan masalah sosial		0%	0,00	85%	786.260.000	87%	786.260.000	87%	1.572.520.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Terlaksananya pembinaan bagi pengurus LKSA dan Perguruan Silat												
								Terlaksananya BOP Bantuan Sosial LKSA												
								Terlaksananya Bantuan Sosial LKSA												
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau, mendapat rujukan serta terpantau dan terpelihara**		**87%**	**812.259.850**	**85%**	**1.030.499.850**	**87%**	**1.082.024.842**	**87%**	**2.924.784.542**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Terwujudnya Pemeliharaan Anak Terlantar**		**87%**	**712.260.000**	**0%**	**0,00**	**87%**	**26.725.000**	**87%**	**738.985.000**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		1	06	05	2.01	01	Penjangkauan anak-anak terlantar	Terlaksananya penanganan anak terlantar		0%	0,00	0%	0,00	87%	10.000.000	87%	10.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	05	2.01	02	Rujukan anak-anak terlantar	Terlaksanakanya rujukan anak-2 terlantar di Panti		0%	0,00	0%	0,00	87%	10.000.000	87%	10.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Monitoring pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar yang berada di Panti			712.260.000	0%	0,00	87%	6.725.000	87%	718.985.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**87%**	**99.999.850**	**85%**	**1.030.499.850**	**87%**	**1.055.299.842**	**87%**	**2.185.799.542**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir miskin cakupan daerah Kab/kota	Fasilitasi Pendataan Fakir Miskin		0%	0,00	0%	0,00	87%	7.500.000	87%	7.500.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi pengentasan kemiskinan		87%	99.999.850	85%	145.999.850	87%	153.299.842	87%	399.299.542	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Terlaksananya fasilitasi verifikasi dan validasi DTKS												
								Terlaksananya sosialisasi program /kegiatan penanganan masalah sosial												
								Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga				Baru
		1	06	05	2.02	03	Fasilitasi bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Bantuan Sosial Siswa Miskin		0%	0,00	85%	884.500.000	87%	884.500.000	87%	1.769.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Terlaksananya BOP Bantuan Sosial Siswa Miskin												

								Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga				Baru
		1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pemberian bantuan pengembangan ekonomi warga miskin		0%	0,00	0%	0,00	87%	10.000.000	87%	10.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Pelayanan PMKS**		**87%**	**240.999.800**	**85%**	**234.788.150**	**87%**	**246.527.558**	**87%**	**722.315.508**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**87%**	**240.999.800**	**85%**	**234.788.150**	**87%**	**243.527.558**	**87%**	**719.315.508**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	

		1	06	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Teratasinya kebutuhan pangan bagi keluarga penerima manfaat akibat bencana alam maupun sosial		87%	240.999.800	85%	234.788.150	87%	237.527.558	87%	713.315.508	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang			Baru
		1	06	06	2.01	02	Penyediaan sandang	Teratasinya kebutuhan sandang bagi keluarga penerima manfaat akibat bencana alam maupun sosial		0%	0,00	0%	0,00	87%	1.500.000	87%	1.500.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang			Baru

		1	06	06	2.01	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Terlaksananya Tempat Penampungan Pengungsi		0%	0,00	0%	0,00	87%	1.500.000	87%	1.500.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	06	2.01	04	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		0%	0,00	0%	0,00	87%	1.500.000	87%	1.500.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		1	06	06	2.01	05	Pelayanan dukungan psikososial	Terlaksananya Dukungan Psikososial		0%	0,00	0%	0,00	87%	1.500.000	87%	1.500.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru

		1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**87%**	**3.000.000**	**87%**	**3.000.000**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		1	06	06	2.02	01	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		0%	0,00	0%	0,00	87%	1.500.000	87%	1.500.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Kampung		Kampung		Kampung		Kampung			Baru
		1	06	06	2.02	02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		0%	0,00	0%	0,00	87%	1.500.000	87%	1.500.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang					Baru
		1	**06**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang Aktif**		**85%**	**325.366.950**	**85%**	**327.716.950**	**85%**	**457.352.797**	**85%**	**1.110.436.697**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		1	**06**	**02**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**0%**	**0,00**	**85%**	**24.335.500**	**85%**	**25.552.275**	**85%**	**49.887.775**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah. (Perbankkan/ Bank, Toko/ Swalayan, Instansi dll)		0%	0,00	85%	24.335.500	85%	25.552.275	85%	49.887.775	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang, Tenaga Kesejahteraan, Keluarga, Lembaga yang Meningkat Kapasitasnya serta Jumlah Sertifikat dari Hasil Peningkatan Jumlah Kapasitas**		**85%**	**325.366.950**	**85%**	**303.381.450**	**85%**	**431.800.522**	**85%**	**1.060.548.922**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		1	06	02	2.03	01	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenganan Kab/Kota	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM pekerja sosial masyarakat (PSM) daerah Kabupaten		85%	41.586.000	85%	20.800.000	85%	21.840.000	85%	84.226.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru

		1	06	02	2.03	02	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Daerah Kabupaten		85%	259.395.450	85%	261.195.450	85%	262.505.222	85%	783.096.122	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang			Baru
		1	06	02	2.03	03	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kab/kota	Terlaksananya peran serta perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejateraan sosial		0%	0,00	0%	0,00	85%	50.000.000	85%	50.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga			Baru

		1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kab/kota	Terlaksananya peningkatan kelembagaan karang taruna di Kabupaten/ Kota		85%	24.385.500	85%	21.386.000	85%	22.455.300	85%	68.226.800	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Lembaga		Lembaga		Lembaga		Lembaga				Baru
		1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan potensi sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Terlaksananya peningkatan kemampuan potensi dan SDM dan penguatan LK3 di Daerah Kbaupaten/ Kota		0%	0,00	0%	0,00	85%	75.000.000	85%	75.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		Sertifikat		Sertifikat		Sertifikat		Sertifikat				Baru

		1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Presentase Fasilitasi TMP**		**85%**	**34.397.250**	**85%**	**53.882.850**	**85%**	**151.576.992**	**85%**	**239.857.092**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	**Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**		**85%**	**34.397.250**	**85%**	**53.882.850**	**85%**	**151.576.992**	**85%**	**239.857.092**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan		0%	0,00	0%	0,00	85%	95.000.000	85%	95.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terpelihara sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan		85%	34.397.250	85%	53.882.850	85%	56.576.992	85%	144.857.092	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		Makam		Makam		Makam		Makam				Baru
		2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**													
		2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender**		**93%**	**186.155.000**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**227.600.000**	**100%**	**563.755.000**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**93%**	**74.400.000**	**100%**	**88.050.000**	**100%**	**92.552.500**	**100%**	**255.002.500**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan singkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Terlaksananya Pembuatan Buku PUG dan PPRG Kabupaten Nganjuk		0%	0,00	100%	7.200.000	100%	7.560.000	100%	14.760.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya rapat Koordinasi bagi Pokja PUG, Tim Fokal Point OPD dan Desa serta Lembaga masyarakat dan Perguruan Tinggi		0%	0,00	100%	48.200.000	100%	50.610.000	100%	98.810.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	08	02	2.01	03	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pembinaan PUG bagi Lembaga Masyarakat		93%	74.400.000	100%	24.650.000	100%	25.882.500	100%	124.932.500	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah				Baru
		2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang PUG dan Modul Pelatihan PUG dan PPRG bagi Focal Point OPD dan Desa Serta Pedamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tingkat Kecamatan dan Desa		0%	0,00	100%	8.000.000	100%	8.500.000	100%	16.500.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah				Baru
		2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**93%**	**111.755.000**	**100%**	**8.650.000**	**100%**	**39.082.500**	**100%**	**159.487.500**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partiasipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan bagi Organisasi Perempuan		93%	111.755.000			100%	30.000.000	100%	141.755.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	08	02	2.02	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Terbentuknya tenaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		0%	0,00	100%	8.650.000	100%	9.082.500	100%	17.732.500	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Organisasi		Organisasi		Organisasi		Organisasi				Baru

		2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terbentuknya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Terlaksananya Workshop bagi Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat dan Perguruan Tinggi**		**0%**	**0,00**	**100%**	**53.300.000**	**100%**	**95.965.000**	**100%**	**149.265.000**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	08	02	2.03	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		0%	0,00	100%	9.500.000	100%	9.975.000	100%	19.475.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan						Lembaga						Baru

		2	08	02	2.03	02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		0%	0,00	100%	43.800.000	100%	45.990.000	100%	89.790.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						Orang					Baru
		2	08	02	2.03	03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		0%	0,00	0%	0,00	100%	40.000.000	100%	40.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia						Dokumen					Baru

		2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah/Kota**		**93%**	**37.843.000**	**100%**	**142.267.550**	**100%**	**149.380.927**	**100%**	**329.491.477**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
								Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga												
		2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Persentase Keluarga yang melaksanakan pendidikan Kesetaraan Gender dalam Keluarga**		**93%**	**17.530.000**	**100%**	**71.754.850**	**100%**	**75.342.592**	**100%**	**164.627.442**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan materi dan alat edukasi untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak		0%	0,00	100%	15.000.000	100%	15.750.000	100%	30.750.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah				Baru
		2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0%	0,00	100%	41.754.850	100%	43.842.592	100%	85.597.442	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru

		2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		93%	17.530.000	100%	15.000.000	100%	15.750.000	100%	48.280.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah**	**Jumlah penguatan dan pengambangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten**		**0%**	**0,00**	**100%**	**39.999.700**	**100%**	**41.999.685**	**100%**	**81.999.385**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	

		2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan		0%	0,00	100%	14.999.800	100%	15.749.790	100%	30.749.590	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	
		2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0%	0,00	100%	14.999.900	100%	15.749.895	100%	30.749.795	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	
		2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Optimalisasi peran forum Puspa)		0%	0,00	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	20.500.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**87%**	**20.313.000**	**100%**	**30.513.000**	**100%**	**32.038.650**	**100%**	**82.864.650**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan optimalisasi		87%	20.313.000	100%	30.513.000	100%	32.038.650	100%	82.864.650	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								peran forum Puspaga											
								Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		Layanan		Layanan		Layanan		Layanan			Baru
		2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentasi OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak**		**0%**	**0,00**	**100%**	**17.530.000**	**100%**	**18.406.500**	**100%**	**35.936.500**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang memasukkan Data Gender dan Anak dalam Aplikasi**		**0%**	**0,00**	**100%**	**17.530.000**	**100%**	**18.406.500**	**100%**	**35.936.500**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
								Jumlah Data Gender dan Anak Bahan Analisis dan Penyajian Data											
		2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Data Gender dan Anak		0%	0,00	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	20.500.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pilah Gender dan Anak dalam Bentuk Buku		0%	0,00	100%	7.530.000	100%	7.906.500	100%	15.436.500	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**		**87%**	**169.728.600**	**100%**	**225.236.600**	**100%**	**611.498.430**	**100%**	**1.006.463.630**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Gugus Tugas Kabupaten dan Jumlah Penguatan Kecamatan Layak Anak**		**87%**	**101.745.800**	**100%**	**225.236.600**	**100%**	**236.498.430**	**100%**	**563.480.830**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	

		2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Kecamatan Layak Anak				100%	67.982.800	100%	71.381.940	100%	139.364.740	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		Organisasi		Organisasi		Organisasi		Organisasi				Baru

		2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pengurus Forum Anak; Terlaksananya Kegiatan Kongres Anak; Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak Kecamatan; Terlaksananya Pengiriman Delegasi Forum Anak Jawa Timur dan Forum Anak Nasional		87%	101.745.800	100%	157.253.800	100%	165.116.490	100%	424.116.090	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan KLA serta Peningkatan Pemenuhan Hak Anak**		**87%**	**67.982.800**	**0%**	**0,00**	**100%**	**375.000.000**	**100%**	**442.982.800**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	

		2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan bimbingan teknis Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak; terlaksananya kegiatan bimbingan teknis pemenuhan hak anak bagi pengelola PAUD di kecamatan		87%	67.982.800	0%	0,00	100%	50.000.000	100%	117.982.800	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Kegiatan Roadshow Pemenuhan Hak Anak di lembaga Sekolah/Madrasah		0%	0,00	0%	0,00	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Edukasi dan Publikasi Pemenuhan Hak Anal kepada Masyarakat melalui Visual dalam bentuk leaflet, booklet, spanduk, banner		0%	0,00	0%	0,00	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional dan Kreativitas Anak bersama Lembaga Sekolah, Sekolah Luar		0%	0,00	0%	0,00	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

							Kabupaten/Kota	Biasa, Panti Asuhan, Pesantren													
								Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**		**87%**	**80.580.000**	**100%**	**68.580.000**	**100%**	**872.000.000**	**100%**	**1.021.160.000**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi**		**87%**	**80.580.000**	**100%**	**68.580.000**	**100%**	**272.000.000**	**100%**	**421.160.000**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penjangkauan, pendampingan, konseling, penanganan kasus, dan layanan medis bagi korban kekerasan terhadap anak		87%	80.580.000	100%	68.580.000	100%	172.000.000	100%	321.160.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah				Baru
		2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui lembaga pojok pengaduan terpadu (POKADU) kerja sama dengan TP PKK		0%	0,00	0%	0,00	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru

		2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan , Eksploitasi serta penguatan Kelembagaan KLA,Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak, Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi**		**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus		0%	0,00	0%	0,00	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru

		2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) tentang perlindungan anak		0%	0,00	0%	0,00	100%	125.000.000	100%	125.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Terlaksananya rapat koordinasi bagi lembaga, penyedia layanan, lingkup P2TP2A dan LPA													
								Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Layanan		Layanan		Layanan		Layanan			Baru
		2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya publikasi berupa pengadaan Baleho, Kalender, Siaran Radio, dan Radar Nganjuk guna meminimalisir kasus KTPA		0%	0,00	0%	0,00	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi ke lembaga penyedia layanan bagi pengelola yang mengasuh anak dalam rangka Perlindungan Khusus Anak		0%	0,00	0%	0,00	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru

		2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyedia Sarana dan Prasarana serta Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perindungan Khusus**		**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**150.000.000**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0%	0,00	0%	0,00	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0%	0,00	0%	0,00	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru

		2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0%	0,00	0%	0,00	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**		**87%**	**18.724.100**	**89%**	**18.724.100,00**	**100%**	**290.000.000**	**100%**	**327.448.200**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	

		2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Kooordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota** **Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota**		**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**100%**	**29.425.900**	**100%**	**29.425.900**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan bagi masyarakat		0%	0,00	0%	0,00	100%	14.425.900	100%	14.425.900	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen				Baru
		2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya mediasi dan konseling bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan		0%	0,00	0%	0,00	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah				Baru

		2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perempuan Korban Kekerasan terhadap Kabupaten/ Kota yang Mendapat Layanan Pengaduan dan Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi**		**87%**	**18.724.100**	**100%**	**18.724.100**	**100%**	**235.000.000**	**100%**	**235.000.000**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	
		2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pendampingan korban di Polres, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama.		0%	0,00	0%	0,00	100%	220.000.000	100%	220.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		Orang		Orang		Orang		Orang			Baru

		2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya laporan data korban kekerasan terhadap perempuan melalui sistem informasi online (SIMFONI)		87%	18.724.100	100%	18.724.100	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Layanan		Layanan		Layanan		Layanan				Baru
		2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan**			**0,00**		**0,00**	**100%**	**25.574.100**	**100%**	**25.574.100**	**Dinas Sosial PPPA**	**Kab. Nganjuk**	

								Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas												
								Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Pemenuhan Kebutuhan Spesifik												
								Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan												

		2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana prasarana kebutuhan korban di shelter WCC		0%	0,00	0%	0,00	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan				Baru
		2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring dan evaluasi bagi lembaga layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Nganjuk		0%	0,00	0%	0,00	100%	12.250.000	100%	12.250.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			0%	0,00	0%	0,00	100%	1.000.000	100%	1.000.000	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama
								Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik		Orang		Orang		Orang		Orang				Baru
		2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			0%	0,00	0%	0,00	100%	2.324.100	100%	2.324.100	Dinas Sosial PPPA	Kab. Nganjuk	Lama

								Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen					Baru
JUMLAH TOTAL											**10.056.418.400**		**16.859.284.000**		**23.745.766.813**		**50.661.469.213**				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinsos PPPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1.1 berikut ini.

Tabel 7.1.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Rumus penghitungan	Kondisi 2020	Target tahun (%)		
				2021	2022	2023
1	Tingkat kemiskinan	∑ Penduduk Miskin Th.n x100% ∑ Penduduk Tahun n	11,62% Sebelum perubahan	10,36	9,97	9,57
			Sesudah perubahan	11,85	11,80	11,75
2	Persentase penurunan PMKS (Sebelum perubahan)	(Jumlah PMKS tahun n/Jumlah Penduduk tahun n) x 100% - (jumlah PMKS th n-1/jumlah penduduk th n-1) x 100%	0,3% Sebelum perubahan	0,40	0,40	0,40
	Sesudah perubahan	**Menjadi indikator Dinsos P3A** **Persentase PMKS menurun**	7,94% Sesudah perubahan	4,47	4,17	3,87
3	Meningkatnya IPG	$IPG = \frac{IPM_p}{IPM_l}$	93,26% Sebelum perubahan	94,38	94,68	94,98
			Sesudah perubahan	93,36	93,46	93,56
4	Meningkatnya IDG	$IDG = \frac{1}{3}[I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis}]$	69,90% Sebelum perubahan	67,16%	67,36%	67,56%
			69,90% Sesudah perubahan	69%	71%	72%

7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja kunci Dinsos PPPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.2.1 berikut ini

Tabel 7.2.1

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Kondisi 2020	Target tahun (%)		
			2021	2022	2023
1	Persentase jumlah PMKS yang tertangani	99,87%	92	94	95
2	Persentase PMKS menurun	7,94%	4,37	3,97	3,57
3	Persentase PSKS yang aktif	78,61%	55	60	65
3	Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural	32,78%	35	40	45
4	Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	100	100	100
5	Persentase Kecamatan Layak Anak	5% Sebelum perubahan	50	75	100
		5% Setelah perubahan	5	10	15

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2014-2018 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Isu Strategis Urusan Sosial:

1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan semakin meningkat
2. Kebutuhan terhadap data kemiskinan yang terpadu, valid dan update semakin meningkat
3. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan semakin meningkat
4. Pengelolaan data kemiskinan semakin terintegrasi guna mendukung kebijakan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan

Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Pemahaman masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak semakin meningkat.
2. Kesempatan perempuan dalam partisipasi pemerintahan, politik, dan pembangunan semakin meningkat.
3. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam PUG semakin meningkat
4. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak semakin meningkat
5. Partisipasi masyarakat dalam penanganan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin meningkat